



**PUTUSAN**

Nomor 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**NAMA PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Wanatangi Rt. 004 Rw. 003, Desa Sambong, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS BUDI PURNOMO, SH.**, Advokat yang berkantor di **GEMBONG RT. 011 RW. 006, KECAMATAN BOJONGSARI, KABUPATEN PURBALINGGA** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2022, sebagai Pemohon

Melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Dusun Wanatangi Rt. 004 Rw. 003, Desa Sambong, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara -, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 08 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 21 Oktober 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 765/ 49/ X/ 2007 dalam setatus Duda dan Perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Wanatangi Rt. 004 Rw. 003, Desa Sambong, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara sampai awal Desember 2020 dan selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. **NAMA ANAK**, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
  2. **NAMA ANAK**, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis yang disebabkan karena :
  - 4.1. Termohon mempunyai sifat mudah marah, tidak taat terhadap Pemohon dimana Termohon sudah tidak bisa mendengarkan nasehat dari Pemohon;
  - 4.2. Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang sudah diberikan Pemohon dari hasil pekerjaan Pemohon;
5. Bahwa sifat Termohon yang keras, membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin kacau. Masalah kecil dalam keluarga bisa menjadi besar. Bermula dari perbincangan biasa menjadi besar, akibat

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan tersebut, puncaknya pada awal Desember 2020 atau selama 2 tahun lamanya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan adanya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih berselisih dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Pihak keluarga telah berusaha menasehati supaya mau rukun namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah keluar dari tujuan dan cita-cita luhur dari suatu perkawinan yang mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon sehingga Pemohon memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;
8. Bahwa karenanya telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Banjarnegara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima perkara ini, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini guna memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj 'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;
- Atau ;

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3303120604790005 tanggal 29 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 765/ 49/ XI/ 2007 tanggal 21 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. **IDENTITAS SAKSI 1**, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon mempunyai sifat mudah marah, sedikit saja masalah selalu di besar besarkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. IDENTITAS SAKSI 2**, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saya tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon sering marah marah karena masalah yang sepele;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun, Pemohon tinggal di .rumah porangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Oktober 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon mempunyai sifat mudah marah, tidak taat terhadap Pemohon dimana Termohon sudah tidak bisa mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang sudah diberikan Pemohon dari hasil pekerjaan Pemohon;
2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama selama 2 tahun lamanya;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nangim, M.H. serta Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi. bertepatan dengan tanggal Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Drs. H. M. Mursyid**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. Nangim, M.H.**

**Drs. H. Salim, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Toib, S.H.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 2569/Pdt.G/2022/PA.Ba